

**KEGAGALAN KELAS MENENGAH INDONESIA MELAWAN POPULISME DAN
KEMUNDURAN DEMOKRASI DALAM PILPRES 2024**

Ekafarras Kurnia Firmansyah¹, Mustabsyrotul Ummah Mustofa²

^{1,2,3}Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi: ekarythm@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the role of the Indonesian middle class in the trend of democratic backsliding, highlighting the 2024 general election as the most recent context. The study demonstrates that the Indonesian middle class has failed to stem the rise of populism and the trend of autocratization that increasingly erodes the quality of democracy. This failure is not a singular phenomenon, but rather an accumulation of historical and structural factors, such as the middle class's dependence on the state, transactional politics, internal fragmentation, and a prioritization of economic stability over substantive democratic values. This research employs a literature study method with thematic analysis of academic literature, reports from credible institutions, as well as national and international media related to the issue of the middle class and democracy in Indonesia. The results of the analysis affirm that the historical characteristics of a fragile middle class and its dependence on the state render it permissive toward populist figures. This phenomenon is reflected in the victory of Prabowo-Gibran in the 2024 election, which was supported by the majority of the middle class oriented toward short-term economic stability, even at the expense of democratic principles. These findings underscore the significant challenge for cultivating collective middle-class consciousness in support of a more substantive democracy.

Keywords: Middle class, Democratic Backsliding, Populism, 2024 Election, Autocratization.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran kelas menengah Indonesia dalam tren kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*), dengan menyoroti pemilihan umum 2024 sebagai konteks terbaru. Kajian ini menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia gagal membendung kebangkitan populisme dan tren otokratisasi yang semakin mengikis kualitas demokrasi. Kegagalan ini bukan fenomena tunggal, melainkan akumulasi faktor historis dan struktural, seperti ketergantungan kelas menengah pada negara, politik transaksional, fragmentasi internal, dan prioritas pada stabilitas ekonomi ketimbang nilai demokrasi substantif. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan analisis tematik terhadap literatur akademik, laporan lembaga kredibel, serta media nasional dan internasional terkait isu kelas menengah dan demokrasi di Indonesia. Hasil analisis menegaskan bahwa karakteristik historis kelas menengah yang rapuh dan ketergantungan pada negara membuat mereka permisif terhadap figur populis. Fenomena ini tercermin dalam kemenangan Prabowo-Gibran pada pemilu 2024, yang didukung mayoritas kelas menengah dengan orientasi pada stabilitas ekonomi jangka pendek, meski mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi. Temuan ini menegaskan tantangan besar bagi pembangunan kesadaran kolektif kelas menengah untuk mendukung demokrasi yang lebih substansial.

Kata kunci: Kelas menengah, Kemunduran Demokrasi, Populisme, Pemilu 2024, Otokratisasi.

PENDAHULUAN

Tren penurunan demokrasi (*democratic backsliding*) telah menjadi isu global di kalangan akademisi politik kontemporer. Laporan Indeks Demokrasi V-Dem (V-Dem Annual Democracy Report) 2024-2025 menunjukkan penurunan demokrasi yang nyata, bahkan menyebut dunia tengah berada pada masa

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

151

Indexed

SINTA 4



PKP|INDEX



“gelombang otokratisasi” (*wave of autocratization*) dengan level demokrasi setara tahun 1985 (V-Dem, 2024; V-Dem, 2025). Laporan 2025 menunjukkan tren yang serupa dengan tahun sebelumnya, namun tetap mengkhawatirkan: Eropa Timur dan Asia Tengah mengalami penurunan tajam, sementara negara-negara Barat yang identik dengan demokrasi juga mulai goyah. V-Dem menyebut hanya tersisa 88 negara yang benar-benar demokratis, sedangkan 91 sisanya masuk kategori otokratis.

Senada dengan V-Dem, laporan Freedom House menggambarkan hal serupa. Dalam laporan tahunan Freedom in the World 2025 (Freedom House, 2025), temuan utamanya menyebut 2024 sebagai tahun ke-19 penurunan kualitas kebebasan global (*global freedom*), didasari banyaknya negara yang menyelenggarakan pemilu di tahun 2024 (66 negara). Hampir setengah dari negara-negara ini mengalami manipulasi, kecurangan, dan kekerasan elektoral, dan hanya 35 negara yang dinyatakan demokratis serta adil secara elektoral (dikategorikan “Free” oleh Freedom House). Freedom House menyebut beberapa kontributor fenomena ini: (1) pemerintahan terpilih yang melemahkan institusi demokrasi seperti persekusi media, pembiaran korupsi, dan intervensi independensi yudisial (terjadi di Korea Selatan, India, Serbia, Slovakia, Mexico, dan Amerika Serikat); (2) keterlibatan aktor non-negara bersenjata yang mengancam kebebasan warga, institusi penegak hukum, dan proses elektoral. Ancaman konflik antarnegara seperti Ukraina-Rusia dan Timur Tengah turut mempengaruhi indeks ini.

Fenomena global ini tidak bisa dianggap minim urgensi. Pandangan yang menganggapnya sekadar “satu lagi badai yang akan menemukan titik terangnya”, sebagaimana ditulis Serge Schmemmann dalam The New York Times (2025), adalah pandangan yang menyesatkan. Faktor utamanya dapat dikaji melalui kebangkitan partai dan kandidat populis yang naik ke kekuasaan pada 2024. Foreign Policy (2023) telah memprediksi bahwa pemilu 2024 akan diwarnai populisme sayap kanan yang kuat. Terbukti, pemilu 2024 melahirkan para populis baru: Trump di Amerika Serikat, Giorgia Meloni di Italia, Javier Milei di Argentina, Viktor Orban di Hungaria (Constantini, 2025), serta Narendra Modi di India dan Prabowo Subianto di Indonesia. Naiknya para populis ini berbanding lurus dengan erosi demokrasi global, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup mengkhawatirkan.

Laporan V-Dem 2025 menempatkan Indonesia, bersama Filipina, sebagai negara yang berlanjut mengalami penurunan kualitas demokrasi dengan label “otokrasi elektoral” atau *electoral autocracy*. Levitsky & Way (2010) menjelaskan *electoral autocracy* sebagai proses memperoleh kekuasaan melalui institusi dan mekanisme demokratis, namun dengan aturan main yang telah diatur untuk menguntungkan pihak tertentu. Istilah lainnya adalah *competitive authoritarian*, sedangkan rezim yang dihasilkan disebut rezim hibrida (*hybrid regime*) yang menggunakan demokrasi sebagai selubung otoritarianisme.

Mietzner (2025) merinci faktor-faktor merosotnya demokrasi Indonesia: (1) menguatnya cabang eksekutif dengan dilemahkannya lembaga pengawasan seperti KPK, koalisi super besar di parlemen, kontrol atas partai politik, dan penyalahgunaan regulasi untuk meredam oposisi pada masa Joko Widodo; (2) penyempitan ruang kompetisi pemilu melalui aturan pendirian partai dan ambang batas parlemen yang berat, tingginya biaya kampanye dan keterlibatan oligarki, serta menurunnya jumlah kandidat presiden (5 kandidat di 2004, 2 di 2014 dan 2019, 3 di 2024); (3) jaringan media besar yang terkooptasi karena para pemiliknya oligarki pro-pemerintah; (4) represi kebebasan berpendapat melalui aturan seperti UU ITE; (5) keterlibatan oligarki dalam jabatan-jabatan penting sehingga pengaruh politik didominasi kekayaan pribadi; serta (6) polarisasi agama dan identitas untuk mobilisasi politik. Meski demikian, Mietzner memandang Indonesia belum akan menjadi otokrasi penuh karena dua hal: sistem pemilu multipartai dan desentralisasi kekuasaan sebagai pembatas kekuasaan pusat, serta demokrasi masih dianggap lebih menguntungkan bagi elit dibanding otoritarianisme personal ala Orde Baru.

Sebagai negara yang menyelenggarakan pemilu 2024, Indonesia disoroti V-Dem dan Freedom House dalam laporan 2025. Keduanya menyebut pemilu Indonesia sarat kontroversi yang membawanya ke iklim *electoral autocracy*. Berbagai manuver presiden petahana dan koalisinya meliputi penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*), penyelewengan sumber daya negara (*abuse of state resource*), manipulasi aturan (*rule manipulation*), dan politik uang (*money politics*) untuk memenangkan pasangan Prabowo

Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang menurut Birch (2011) tergolong korupsi elektoral. Kendati demikian, partisipasi politik mencapai 81,78% (Litbang Kompas, 2024). Angka ini menunjukkan mayoritas masyarakat masih mendukung demokrasi, namun diasumsikan hanya pada tataran elektoral, bukan pada nilai yang lebih mengakar; sehingga masyarakat, termasuk golongan menengah, cukup permisif terhadap figur populis atau bertendensi otoriter selama prosedur pemilu dan stabilitas terjaga (BTI Transformation Index, 2024).

Hal lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah keterlibatan kelas menengah yang dipertanyakan relevansinya dalam mendorong kualitas demokrasi. Jacqui Baker (2023) menjelaskan bagaimana faktor-faktor erosi demokrasi—seperti dijelaskan Mietzner—juga mempengaruhi gerakan masyarakat sipil. Baker memandang pemerintahan Joko Widodo kerap melakukan kooptasi, fragmentasi, represi, hingga demobilisasi gerakan sipil sebagai strategi struktural untuk menggeser kekuasaan (*shifting power*) menjadi lebih otoriter. Akar masalahnya adalah perubahan sosial-ekonomi besar dua dekade terakhir yang memunculkan Kelas Menengah Rapuh (*Precariously Non-Poor*) (Baker, 2023; Hill, 2021), yaitu kelompok yang sudah mengalami mobilisasi sosial ke atas namun masih rentan jatuh miskin. Baker memandang kelompok rentan ini menjadi sasaran strategis kepentingan politik rezim karena mudah dimobilisasi narasi populis dan terkooptasi, sesuatu yang kelak tergambar dalam pemilihan presiden 2024.

Meski literatur tentang *democratic backsliding* di Indonesia telah mengidentifikasi faktor-faktor pendorongnya, peran spesifik kelas menengah masih belum jelas diteliti. Studi klasik demokrasi memandang kelas menengah sebagai faktor besar dalam mendorong demokrasi (Lipset, 1959; Moore, 1993), namun dalam konteks kontemporer Indonesia pandangan ideal tentang kelas menengah *juncto* demokrasi yang selalu dianggap linear ini harus digali lebih dalam. Terlebih, penurunan demokrasi sepuluh tahun terakhir menjadi pertimbangan penting, sebab kelas menengah justru menjadi pendorong pelemahan ini melalui kooptasi ke narasi populis serta adopsi narasi konservatif pro-stabilitas yang mengabaikan prinsip demokrasi partisipatif (Mietzner, 2020; 2025; Baker, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah menaruh perhatian pada relasi kelas menengah dan demokrasi di Indonesia dari sudut pandang yang beragam. Kajian klasik menempatkan kelas menengah sebagai motor utama demokratisasi seiring pertumbuhan ekonomi (Lipset, 1959; Moore, 1993), sementara studi historis Indonesia justru menunjukkan karakter kelas menengah yang bergantung pada negara dan lemah secara politik (Lev, 1993; Mackie, 1993; Robison, 1996). Kajian kontemporer melihat kelas menengah pasca-Reformasi cenderung terfragmentasi dan berorientasi pada isu sektoral (Savirani, 2019), sedangkan literatur mutakhir memusatkan perhatian pada kemunduran demokrasi dan faktor strukturalnya (Mietzner, 2020; 2025; Baker, 2023). Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut membahas kemunduran demokrasi dan posisi kelas menengah secara terpisah, dan belum banyak yang menautkan keduanya secara langsung dalam konteks pemilihan presiden 2024, di sinilah letak urgensi penelitian ini. Pemilu 2024 merupakan momentum penting yang memperlihatkan bagaimana kelas menengah bersikap ketika demokrasi berada dalam tekanan populisme dan otokratisasi. Dengan menautkan perspektif historis, sosial-ekonomi, dan perilaku politik elektoral, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut sekaligus memberikan pemahaman yang lebih utuh atas peran kelas menengah dalam tren kemunduran demokrasi di Indonesia.

Mengacu pada penjabaran Mietzner tentang kemunduran demokrasi Indonesia dan kerangka Baker tentang kelas menengah, penelitian ini secara spesifik menganalisis bagaimana kombinasi tren penurunan demokrasi dan perubahan sosial-ekonomi mencerminkan posisi dan keberpihakan kelas menengah terhadap demokrasi, serta menyorot kegagalan kelas menengah membendung populisme dan gelombang otokratisasi dalam pemilihan presiden 2024, dengan terlebih dulu melihat bagaimana dinamika historis kelas menengah Indonesia membentuk paradigma dan perilaku politiknya.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan metode studi literatur dan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2006), yang menekankan muatan naratif tentang apa yang dibahas dalam sumber data (Riessman, 2008). Sumber data mencakup literatur akademik, laporan lembaga kredibel seperti V-Dem, Freedom House, dan CSIS periode 2020-2025, serta artikel dan opini media arus utama nasional dan internasional. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam tema berdasarkan kombinasi kata kunci *middle class*, *democratic backsliding*, *populism*, *Indonesian middle class*, dan *2024 Indonesian presidential election*, untuk kemudian ditarik kesimpulan menyeluruh atas sumber yang dikumpulkan.

PEMBAHASAN

Kelas Menengah dan Demokrasi di Indonesia

Secara historis, formasi sosial di Indonesia masih dipengaruhi dominasi politik kolonial pada masa awal kemerdekaan, sebagaimana negara baru merdeka lainnya (Tanter & Young, 1993). Kendati banyak dibicarakan pada era Orde Baru, Daniel S. Lev (1993) menyebut persoalan ini “bukan merupakan sebuah stratum yang sama sekali baru, melainkan sesuatu yang berkembang secara gradual”. Lev menjelaskan pada 1910-1920an sejumlah profesional lokal (pribumi maupun peranakan Tionghoa) mulai bergabung dengan arus wiraswastawan dan berpikir berbeda, bahkan memprakarsai perubahan seperti mendirikan partai dan memantik revolusi, namun tidak pernah benar-benar terkohehi. Basis kelasnya belum cukup besar. Kebijakan Benteng (1950) dimaksudkan mendorong kekuatan basis kelas ini dengan memberdayakan pengusaha nasional (Wijayanti, 2015), namun Demokrasi Terpimpin melibas usaha-usaha tersebut.

Menelusuri akar sosialnya, Lev menafsirkan golongan menengah sebagai masyarakat desa dan kota yang mengalami mobilisasi sosial ke atas melalui perluasan pendidikan di masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin, atau yang masuk dunia perdagangan sejak masa penjajahan. Selain wiraswastawan, Lev memandang kelompok profesional sebagai komponen penting kelas menengah. Pada Orde Baru, khususnya tahun 1970an, golongan profesional ini berkembang signifikan karena berperan sebagai juru bicara yang artikulatif terhadap gagasan dan prinsip baru, implementator atas nama wiraswastawan kapitalis, perwakilan gaya hidup dan selera baru, serta pelaku reformasi.

Liddle (1993) berpandangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individual di Indonesia bertumpu pada kompas developmentalisme yang menjadi nafas kebijakan masa itu. Namun developmentalisme menimbulkan paternalisme di kalangan birokrat sebagai aktor berotoritas (yang disebut Liddle sebagai birokrat yang berbangga). Kelas menengah non-birokrat menginginkan birokrat lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi, sosial, dan kultural mereka, mencakup pengusaha dan profesional kota serta golongan urban lebih rendah seperti petani dan pengusaha desa yang mulai naik. Namun hal itu belum cukup membuat kelas menengah Indonesia melangkah penuh ke kapitalisme, apalagi mendorong demokrasi, sebagaimana pandangan klasik yang menganggap keduanya selalu berjalan lurus.

Terdapat pandangan pesimistik dari para akademisi yang mengkaji kelas menengah Indonesia masa Orde Baru. Mackie (1993) menyebut adanya “kelembekan kelompok kepentingan”. Di negara kapitalis, pengambilan keputusan umumnya mengalami tarik-ulur setara antara pengendali kepemilikan (*property*) atau sumber daya (*resource*) dengan pemegang kekuasaan politik. Namun di Indonesia Orde Baru, kekuatan negara terlampau besar dan cenderung *vis a vis* dengan kelompok kepemilikan (pengusaha). Mackie memandang kelompok ekonomi ini terlalu “lembek” karena nyaris tanpa pengaruh politik, akibat rezim yang secara esensial sangat patrimonialis. Selain itu, prinsip kapitalisme seperti individualisme belum diterima luas menggantikan nilai tradisional yang menjunjung kekeluargaan; developmentalisme Orde Baru pun meleburkan pandangan tradisional ke dalam ideologi nasional demi pembangunan, sehingga tak boleh ada kepentingan di atas kepentingan nasional.

Salah satu implikasi pertumbuhan ekonomi Orde Baru adalah munculnya lapisan-lapisan di dalam golongan menengah. Robison (1996) menyebut dua golongan kelas menengah Indonesia era Orde Baru:

kelas menengah atas (*the upper middle class*) dan kelas menengah bawah populis (*the populist lower middle classes*). Keduanya sedikit banyak membenarkan pesimisme Mackie, bahwa keduanya tidak benar-benar sejalan dengan nilai kapitalisme dan demokrasi liberal. Kelas menengah atas sangat konservatif dan bersekutu dengan rezim, sementara kelas menengah bawah yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi membuat keberpihakannya bergantung pada relasinya dengan kekuatan lain; masyarakat korporatis kota berlandaskan di bawah borjuasi besar, sedangkan masyarakat desa mencari perlindungan borjuasi kecil (*petty bourgeoisie*) dan militer populis. Robison menyimpulkan kelas menengah Indonesia pada dasarnya masih berorientasi pada kepentingan ekonomis individual, sehingga dorongan transformasi berlandaskan nilai demokrasi masih menjadi kekhawatiran mendasar.

Fragmentasi dan heterogenitas masih mewarnai cara kelas menengah Indonesia menyikapi keadaan sosial-politik pasca-Soeharto. Savirani dalam *The Political Middle Class in Post-Soeharto Era Indonesia* (2019) menjelaskan keberagaman ini menyulitkan terbentuknya solidaritas dan gerakan kolektif yang konsisten untuk mendesak perubahan struktural. Keterlibatan politik kelas menengah lebih terfokus pada isu teknis dan sektoral seperti antikorupsi, pendidikan, atau lingkungan, alih-alih mendorong perubahan sistem politik menuju konsolidasi demokrasi.

Daya Tawar Politik Kelas Menengah Indonesia

Reformasi kerap dianggap titik balik yang membuktikan keinginan terhadap demokrasi menjelma menjadi arah berpijak bangsa, namun pandangan ini baru bisa diuji setelah peristiwa itu jauh berlalu. Jika keresahan utama Orde Baru adalah terpusatnya kekuasaan pada satu figur—Soeharto—dan dambaan atas kedaulatan rakyat, Reformasi dapat dikatakan belum mampu memenuhi cita-cita itu. Max Lane (2019) menegaskan politik Indonesia pasca-Soeharto hanyalah “transaction without contestation”; politik transaksional tanpa kontestasi yang benar-benar berarti. Menurut Lane, politik transaksional ini didominasi konsensus elit tanpa kontestasi pragmatik yang serius. Masa 1998-2002 adalah masa pasca-transisi untuk menjaga stabilitas dengan semangat anti-otoritarianisme. Setelahnya, stabilitas mulai tercipta seiring pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode. Meski berhasil mewujudkan pemilu langsung, maraknya korupsi berdampak pada stagnansi reformasi tata kelola, sebab elit merawat koalisi yang pragmatis dan transaksional. Kondisi inilah yang menjadi arena bagi presiden berikutnya, Joko Widodo (Jokowi), yang harus bermain dalam kerangka koalisi partai yang penuh transaksi.

Meski dianggap “simbol baru” bahkan “harapan baru” bagi demokrasi Indonesia oleh Majalah Time (Beech, 2014), terpilihnya Jokowi yang mengusung citra anti-elit (kontras dengan Prabowo Subianto) dianggap Lane lebih kosmetik dibanding substantif. Jokowi dinilai tidak menawarkan restrukturisasi sistem politik. Sebagai produk rezim SBY dengan fragmentasi dan konsolidasi elit yang telah terbentuk, ditambah latar belakangnya yang bukan elit politik, Jokowi tidak memiliki pilihan selain merangkul elit dan melanggengkan politik transaksional—yang membuat transparansi pemerintah dan keterlibatan rakyat kian terpinggirkan.

Kembali pada argumen Savirani, iklim politik transaksional ini akhirnya membentuk kelas menengah menjadi konservatif dan bergantung pada sumber daya negara. Secara teori, elit yang terkonsolidasi ke dalam rezim transaksional otomatis memegang kendali penting atas sumber daya negara (Rosenfeld, 2021), lalu membuat masyarakat bergantung padanya, terutama kelas menengah rapuh yang disebut Baker. Ketergantungan ini tampak pada banyaknya kelas menengah yang bekerja di sektor publik seperti pegawai BUMN atau konsultan proyek pemerintah; ketergantungan pada anggaran negara berupa gaji, proyek, atau insentif dari APBN/APBD; serta pada ranah elektoral, ketika kontestan mengandalkan dana kampanye dari jaringan proyek atau kontrak pemerintah. Rosenfeld menyebut selama status sosial kelas menengah bergantung pada pemerintah, mereka semakin enggan mendukung demokrasi yang mengganggu zona nyaman mereka.

Ketergantungan ini membuat kelas menengah Indonesia semakin konservatif dan kontra-demokrasi. Sejak era Jokowi, daya tawar politik kelas menengah semakin melemah, sebagaimana disebut Baker

(2023). Konsolidasi elit di paruh kedua pemerintahan Jokowi membuatnya berjalan hampir tanpa oposisi berarti, dengan cakupan luas termasuk efektifnya meredam gerakan sosial melalui represi dan kooptasi elemen kelas menengah agar sinergis dengan agenda pemerintahan (Seeth & Suryomenggolo, 2024). Aspirasi kelas menengah pun kerap dikonversi rezim menjadi narasi yang selaras dengan agenda pemerintah. Protes seperti Gerakan Reformasi Dikorupsi dan Gerakan Indonesia Gelap selalu dibingkai sebagai pengganggu stabilitas (Nugroho, 2025). Contoh lain, pembangunan ibu kota negara (IKN) yang menurut Jokowi merupakan jawaban pemerataan ekonomi (Situs Resmi Presiden Republik Indonesia, 2023), namun sepanjang dan pasca-pembangunan tidak mewujudkan maksud utamanya dan ditengarai sebagai ambisi politik pribadi Jokowi (Project Multatuli, 2024).

Kelas menengah yang tersandera narasi elit menyebabkan aspirasi mereka dialihkan dari tuntutan transformasi sistem menuju harapan pada stabilitas, pembangunan, dan konsistensi kebijakan pemerintah. Ketergantungan pada pemerintah membuat mereka semakin konservatif, enggan menyuarakan transformasi politik yang lebih demokratis, dan hanya berfokus pada isu sektoral alih-alih gambaran besar.

Pemilu 2024: Kegagalan Kelas Menengah Indonesia dan Kebangkitan Otokratisasi di Indonesia

Komplikasi berbagai fenomena selama rezim Jokowi menjadi prakondisi kunci bagi pergantian rezim setelahnya. Menjelang pemilu 2024, Jokowi sebagai petahana melakukan sejumlah manuver yang mencoreng prinsip demokrasi: (1) manipulasi syarat usia minimum pencalonan melalui Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodasi putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mendampingi Prabowo Subianto; (2) upaya melanggengkan politik dinasti melalui pencalonan Gibran; (3) penyelewengan sumber daya negara (*abuse of state resources*) berupa bantuan sosial dan fasilitas negara untuk kampanye; (4) pernyataan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye ketika menjabat (Pepinsky, 2024; Hurriyah, 2024; Reliubun, 2024). Manuver ini berbuah kemenangan telak satu putaran pasangan Prabowo-Gibran dengan 58% suara.

Pada titik ini pemikiran Baker tentang kelas menengah rapuh tampak terang. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 menyebut sepanjang 2018-2023 sebanyak 8,5 juta masyarakat mengalami penurunan kelas dari menengah menjadi calon kelas menengah (*aspiring middle class*) dan rentan miskin (Theodora, 2024). Persentase kelas menengah Indonesia per 2023 hanya 18,5% dari populasi (sebelumnya 23% pada 2018). Data ini memvalidasi argumen Baker bahwa kelas menengah rentan menjadi tantangan bagi eksistensi demokrasi substansial di Indonesia.

Baker menjelaskan sikap politik kelas menengah rapuh Indonesia berorientasi mempertahankan status sosialnya yang rentan. Mereka cenderung mendukung kebijakan yang menawarkan stabilitas ekonomi jangka pendek meski demokrasi mundur. Sebenarnya kelas menengah membutuhkan negara yang efektif mendistribusikan kesejahteraan kolektif, namun dalam rezim koruptif kebijakan programatik semacam itu tak tercipta; justru politik transaksional dan klientelistik yang menguat (Rosenfeld, 2021). Paradoks ini menunjukkan rezim yang korup tidak memberi pilihan lain bagi kelas menengah selain bergantung pada pemerintah, meski pemerintah itu menggerogoti demokrasi. Baker dan Rosenfeld sepakat kelas menengah lebih takut turun kelas dibanding mendorong demokrasi, sebab demokrasi tak bisa menjawab keresahan mereka dalam waktu singkat. Dengan demikian, kelas menengah Indonesia yang lemah tidak mampu membendung populisme yang dimainkan agresif selama pemilu 2024.

Riset Muhtadi & Muslim (2024) menunjukkan kemenangan Prabowo bersifat menyeluruh dari berbagai lapisan masyarakat: etnis, usia, agama, pendidikan, hingga kelas sosial. Pemilih berpendapatan 2-4 juta rupiah hingga di atas 4 juta rupiah (kelas menengah hingga atas) hampir semuanya memilih Prabowo-Gibran dengan persentase di atas 50%. Kondisi ini mematahkan asumsi awal bahwa pemilih menengah dan muda akan lebih progresif. Faktor utamanya adalah pengerahan bantuan sosial (Bansos) dan keberpihakan Jokowi sebagai petahana.

Kontroversi selama pemilu 2024 sempat dieskalasikan menjadi gerakan protes oleh aliansi mahasiswa dan aktivis sipil (Purnama, 2024), bahkan dibawa ke ranah peradilan melalui Sidang Sengketa Pilpres 2024 dengan dalil termasuk *abuse of power* dan *abuse of state resource* oleh petahana (BBC News Indonesia,

2024). Namun Muhtadi & Muslim berpendapat protes golongan terdidik dan aktivis ini hanya berputar di kalangan tertentu. Masyarakat lebih luas tidak begitu khawatir dengan kemerosotan demokrasi, politik dinasti, atau catatan pelanggaran HAM Prabowo, dan kemenangan besar Prabowo-Gibran dianggap terlalu besar untuk dipatahkan klaim kecurangan.

Selain faktor Jokowi yang krusial, permainan citra populis Prabowo berhasil memikat. Setelah gagal di dua pemilu sebelumnya, dengan dukungan koalisi super kuat, Prabowo maju dengan pendekatan berbeda. Ia mencitrakan diri sebagai *gemoy* (*cuddly grandpa*) dan memanfaatkan TikTok serta Instagram untuk menarik simpati, terutama pemilih muda (Watmough, 2024). Ia tak lagi menyerang elite sebagai satu-satunya juru selamat (Ufen, 2024), melainkan tampil lebih kontekstual, cair, dan inklusif, memposisikan diri sebagai patriot yang siap melayani—sebuah populisme yang fluktuatif (*fluctuating populism*) (Yilmaz et al., 2024). Prabowo juga menawarkan visi ekonomi melanjutkan warisan Jokowi, seperti pertumbuhan ekonomi 5%, pembangunan infrastruktur masif termasuk IKN, hilirisasi sumber daya, kebijakan fiskal konservatif, dan optimalisasi investasi asing (Business Indonesia, 2024). Ia juga mendorong kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menangani *stunting*, memperbaiki kualitas SDM, sekaligus mendorong ekonomi (Permana, 2024). Iannone (2025) menyebut kebijakan semacam ini sebagai kebijakan populis yang justru menjadi perangkap ketergantungan rakyat pada negara dan melanggengkan kemiskinan—contoh nyata kapitalisme neofeodal.

Kendati sarat kontroversi, kemenangan Prabowo menunjukkan mayoritas masyarakat termasuk kelas menengah mendambakan stabilitas sosioekonomi melalui keberlanjutan atas apa yang telah dilakukan Jokowi, meski di atas kertas kondisi anggaran Indonesia jauh dari ideal untuk mengeksekusi visi-visi besar itu (Litbang Kompas, 2024). Menerjemahkan kemenangan Prabowo yang datang dari berbagai lapisan termasuk kelas menengah, seperti disebut Muhtadi & Muslim, berarti menegaskan bahwa kelas menengah telah gagal membendung kemerosotan demokrasi di Indonesia. Kombinasi kelas menengah rapuh, perubahan sosial-ekonomi, ketergantungan pada negara, dan rezim yang represif serta koruptif berujung pada kegagalan mereka membendung kekuatan yang mengancam demokrasi, bahkan permisif terhadapnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan kegagalan kelas menengah Indonesia membendung populisme pada pemilu 2024 bukanlah fenomena tunggal, melainkan akumulasi faktor yang saling terkait. Secara historis, kelas menengah Indonesia tidak pernah terkoheksi sebagai kekuatan politik yang independen dan transformatif. Berbeda dengan pandangan klasik Barat, kasus Indonesia menunjukkan fragmentasi internal, orientasi ekonomi individual, dan ketergantungan pada negara sebagai ciri khasnya. Dinamika pasca-Reformasi memperburuk kondisi ini melalui konsolidasi elite yang pragmatis dan transaksional dari SBY hingga Jokowi, yang membuat kelas menengah kian konservatif dan bergantung pada sumber daya negara, sehingga enggan menantang kemapanan rezim meski demokrasi tergerus.

Kegagalan tersebut memuncak pada pemilu 2024, ketika berbagai manuver rezim mulai dari manipulasi aturan pencalonan hingga penyalahgunaan sumber daya negara berujung pada kemenangan telak Prabowo-Gibran. Di tengah penurunan jumlah kelas menengah dan tingginya perilaku permisif, aspirasi kelas menengah teralih dari tuntutan transformasi sistemik menuju harapan atas stabilitas sosioekonomi jangka pendek. Dengan demikian, kegagalan kelas menengah membendung populisme mencerminkan interaksi kompleks antara karakteristik historis yang rapuh, iklim politik transaksional yang koruptif, ketergantungan pada negara, dan prioritas atas kestabilan sosioekonomi. Fenomena ini menjadi catatan penting bagi kajian lanjutan tentang peran kelas menengah dalam demokrasi yang rentan erosi, serta tantangan membangun kesadaran dan solidaritas kolektif untuk memajukan demokrasi.

REFERENSI

- Baker, J. (2023). Reformasi Reversal: Structural Drivers of Democratic Decline In Jokowi's Middle-Income Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(3), 341-364.
doi:<https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2286020>
- BBC News Indonesia. (2024, April 24). *MK tolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024, apa saja dissenting opinion dari tiga hakim yang tak sependapat?* Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0kl1jwkr2ko>
- Beech, H. (2014, Oktober 15). *The New Face of Indonesian Democracy*. Retrieved from Time: <https://time.com/3511035/joko-widodo-indonesian-democracy/>
- Birch, S. (2011). *Electoral Corruption*. Institute for Democracy and Conflict Resolution.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. doi:<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- BTI Transformation Index. (2024). *BTI 2024 Country Report: Indonesia*. BTI Transformation Index.
- Business Indonesia. (2024, Oktober 29). *Prabowo's Economic Plans*. Retrieved from Business Indonesia: <https://business-indonesia.org/news/prabowo-s-economic-plans>
- Constantini, A. J. (2025, April 13). *Populists Are Gaining Power and Keeping It. What Comes Next?* Retrieved from Politico: <https://www.politico.com/news/magazine/2025/04/13/trump-populism-europe-us-00287198>
- Freedom House. (2025). *Freedom in the World 2025*. Freedom House.
- Hill, H. (2021). What's Happened to Poverty and Inequality in Indonesia over Half a Century? *Asian Development Review*, 38(1), 1-30. doi:<https://ssrn.com/abstract=3834468>
- Hurriyah. (2024, April 30). *The Implications for Indonesian Democracy after Prabowo's 2024 Win*. Retrieved from Puskapol: <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/the-implications-for-indonesian-democracy-after-prabowos-2024-win/>
- Iannone, A. (2025, April 10). *Sadarkah kita bahwa program makanan gratis adalah alat kontrol pemerintah terhadap rakyat?* Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/sadarkah-kita-bahwa-program-makanan-gratis-adalah-alat-kontrol-pemerintah-terhadap-rakyat-251269>
- Kampfner, J. (2023, Desember 26). *Right-Wing Populism Is Set to Sweep the West in 2024*. Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2023/12/26/right-wing-populism-are-set-to-sweep-the-west-in-2024/>
- Lane, M. (2019). Indonesia's New Politics: Transaction Without Contestation. In M. Lane, *Continuity and Change after Indonesia's Reforms* (pp. 1-21). ISEAS - Yusof Ishak Institute.
- Lev, D. S. (1993). Catatan Kelas Menengah dan Perubahan di Indonesia. In R. Tanter, & Y. Kenneth, *Politik Kelas Menengah Indonesia* (pp. 45-54). LP3ES.
- Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*. Cambridge University Press.
- Liddle, R. W. (1993). Kelas Menengah dan Legitimasi Orde Baru: Tanggapan bagi Dan Lev. In R. Tanter, & K. Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia* (pp. 51-54). LP3ES.
- Lipset, S. M. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. *The American Political Science Review*, 53(1), 69-105.
doi:<https://www.jstor.org/stable/1951731>
- Litbang Kompas. (2024, April 22). *Memahami Tingkat Partisipasi Pemilu*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/22/memahami-tingkat-partisipasi-pemilih>
- Litbang Kompas. (2024, Januari 3). *Prabowo Subianto, from the Indonesian Paradox to Golden Indonesia 2045*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/english/2024/01/03/en-prabowo-subianto-dari-paradoks-indonesia-ke-indonesia-emas-2045>
- Mackie, J. (1993). Pemilikan dan Kekuasaan di Indonesia. In R. Tanter, & K. Young, *Politik Kelas*

Menengah Indonesia (pp. 77-104). LP3ES.

Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021-1036.

doi:<https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>

Mietzner, M. (2025). The limits of autocratisation in Indonesia: power dispersal and elite competition in a compromised democracy. *The World Quarterly*, 46(2), 153-169.

doi:<https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2317970>

Moore, B. (1993). *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Beacon Press.

Muhtadi, B., & Muslim, K. (2024, Mei 20). *Assessing Prabowo-Gibran's Victory: An Exit-Poll Aftermath Analysis of the 2024 Presidential Election*. Retrieved from Fulcrum:

<https://fulcrum.sg/assessing-prabowo-gibrans-victory-an-exit-poll-aftermath-analysis-of-the-2024-presidential-election/>

Nugroho, P. N. (2025, Februari 25). *Pakar Anggap Respons Luhut soal Indonesia Gelap Bentuk Denial ke Rakyat*. Retrieved from Tempo: <https://www.tempo.co/politik/pakar-anggap-respons-luhut-soal-indonesia-gelap-bentuk-denial-ke-rakyat-1210606>

Pepinsky, T. B. (2024, February). *Why Indonesia's Democracy Is in Danger*. Retrieved from Journal of Democracy: <https://www.journalofdemocracy.org/online-exclusive/why-indonesias-democracy-is-in-danger/>

Permana, R. (2024, November 21). *The Free Nutritious Meal Program: More than just a meal*. Retrieved from Center for Indonesian Policy Studies: <https://www.cips-indonesia.org/post/the-free-nutritious-meal-program-more-than-just-a-meal>

Project Multatuli. (2024). *Membongkar Warisan Ugal-ugalan Pembangunan IKN ala Jokowi*. Retrieved from Project Multatuli: <https://projectmultatuli.org/membongkar-warisan-ugal-ugalan-pembangunan-ikn-ala-jokowi/>

Purnama, K. I. (2024, Februari 20). *4 Kelompok yang Lantang Menolak Hasil Pemilu 2024*. Retrieved from Tempo: <https://www.tempo.co/politik/4-kelompok-yang-lantang-menolak-hasil-pemilu-2024-85445>

Reliubun, I. (2024, Januari 24). *Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, DEEP: Abuse of Power in Election Benar-benar Terasa*. Retrieved from Tempo:

<https://www.tempo.co/politik/jokowi-sebut-presiden-boleh-kampanye-dan-memihak-deep-abuse-of-power-in-election-benar-benar-terasa--94351>

Riessman, C. K. (2008). *Narrative Methods for the Human Science*. Sage.

Robison, R. (1996). The Middle Class and Bourgeoisie in Indonesia. In R. Robison, & D. S. Goodman, *The New Rich in Asia: Mobile Phones, McDonald's and Middle-class Revolution* (pp. 79-104). Routledge.

Rosenfeld, B. (2021). *The Autocratic Middle Class: How State Dependency Reduces the Demand for Democracy*. Princeton University Press.

Savirani, A. (2019). The Political Middle Class in Post-Soeharto Era Indonesia. In M. Lane, *Continuity and Change after Indonesia's Reforms* (pp. 128-146). ISEAS - Yusof Ishak Institute.

Schmemmann, S. (2025, Januari 11). *Democracy Is Not Facing a Global Extinction Event*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2025/01/11/opinion/editorials/liberal-democracy-far-right-authoritarianism-populism-europe.html>

Seeth, A. t., & Suryomenggolo, J. (2024). Politics of Marginalisation in Indonesia: The Jokowi Era. *International Query for Asian Studies*, 55(2), 137-153.

doi:<https://doi.org/10.11588/iqas.2024.2.27205>

Situs Resmi Presiden Republik Indonesia. (2023, Februari 23). *Presiden Jokowi: Alasan Utama Pembangunan IKN Adalah Pemerataan*. Retrieved from Presiden Republik Indonesia:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

159

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX

intemua oneSearch

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

<https://www.presidenri.go.id/foto/presiden-jokowi-alasan-utama-pembangunan-ikn-adalah-pemerataan/>

Tanter, R., & Young, K. (1993). Pendahuluan. In R. Tanter, & K. Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia* (pp. 1-18). LP3ES.

Theodora, A. (2024, Agustus 7). *Lampu Kuning Merosotnya Kelas Menengah Indonesia*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/08/06/lampu-kuning-merosotnya-kelas-menengah-indonesia>

Ufen, A. (2024). Prabowo's Populism in Indonesia: Primary Concept and Secondary Ideas. In S. Wang, *Three Faces of Populism in Asia* (pp. 65-85). Routledge.

V-Dem. (2024). *V-Dem Democracy Report 2024*. V-Dem.

V-Dem. (2025). *V-Dem Democracy Report 2025*. V-Dem.

Watmough, S. P. (2024, Oktober 24). *From Political Pariah to President: Prabowo Subianto and the Perils of Populism in Indonesia*. Retrieved from European Center for Populism Studies: <https://www.populismstudies.org/from-political-pariah-to-president-prabowo-subianto-and-the-perils-of-populism-in-indonesia/>

Wijayanti, Y. (2015). Kebijakan Pemerintah Orde Lama Di Bidang Ekonomi Terhadap Bisnis Orang Cina. *Jurnal Artefak*, 3(2), 113-118. doi:<https://dx.doi.org/10.25157/ja.v3i2.1094>

Yilmaz, I., Bachtar, H., Smith, C., & Shakil, K. (2024, Maret 15). *Fluctuating Populism: Prabowo's Everchanging Populism Across the Indonesian Elections*. Retrieved from European Center for Populism Studies: <https://www.populismstudies.org/fluctuating-populism-prabowos-everchanging-populism-across-the-indonesian-elections/>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

160

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX

